

RINGKASAN

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui *smartphone*. IKD terbentuk dengan tujuan mempermudah serta mempercepat transaksi layanan, baik bersifat publik maupun privat dalam format digital dan meningkatkan pemanfaatan digitalisasi administrasi kependudukan untuk masyarakat. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengimplementasiannya, baik dari isi aplikasi yang belum sesuai harapan kelompok sasaran dan non-teknis, seperti belum mencapai target yang sudah ditentukan, *handphone* pengguna belum *support* digunakan, kurangnya sosialisasi dari Disdukcapil sehingga masyarakat masih banyak yang tidak tahu IKD, serta belum tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh kemendagri yaitu 30% dan kabupaten banyumas baru mencapai . Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan IKD, dalam hal ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan terkait IKD. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994).

Hasil penelitian proses implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Banyumas yaitu: 1) aspek kebijakan yang diidealkan, pada tahap ini disdukcapil dalam mengimplementasikan kebijakan menunjukkan upaya yang berkelanjutan serta komunikasi dilakukan secara bertahap; 2) aspek kelompok sasaran, menunjukkan belum tercapainya target yang sudah ditentukan oleh kemendagri; 3) aspek organisasi pelaksana, disdukcapil melakukan inovasi dengan memberikan hak aksesibilitas kepihak lembaga nonkementerian; 4) aspek faktor sosial, pada aspek tersebut IKD di Kabupaten Banyumas memberikan pengaruh yang kurang baik terutama pada faktor sosial karena masih kurangnya pemahaman kelompok sasaran mengenai IKD dan faktor ekonomi karena pasyariat pengguna belum bisa dipenuhi oleh sebagian masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Identitas Kependudukan Digital

SUMMARY

Digital Population Identity (IKD) is electronic information used to represent population documents and return data in digital applications via smartphones. IKD was formed with the aim of facilitating and accelerating service transactions, both public and private in digital format and increasing the utilization of digitization of population administration for the community. However, in reality, there are still several problems in its implementation, both from the content of the application that has not met the expectations of the target group and non-technical, such as not reaching the predetermined target, the user's cellphone has not been supported, the lack of socialization from Disdukcapil so that many people still do not know about IKD, and not reaching the target set by the Ministry of Home Affairs, which is 30% and banyumas district has only reached. Therefore, research is needed related to the implementation of the IKD policy, in this case at the Population and Civil Registration Office of Banyumas Regency. This study aims to determine the implementation process of the IKD policy in Banyumas Regency.

In this study, the authors used a qualitative approach with purposive sampling technique. The data sources used were primary data obtained through interviews, observations, and documentation, as well as secondary data sources obtained from reports and journals related to the discussion related to IKD. The data analysis method used is the Miles and Huberman (1994) interactive analysis model.

The results of the research on the implementation process of the Digital Population Identity policy in Banyumas Regency are: 1) aspects of the idealized policy, at this stage the disdukcapil in implementing the policy shows continuous efforts and communication is carried out in stages; 2) aspects of the target group, showing that the targets set by the Ministry of Home Affairs have not been achieved; 3) aspects of the implementing organization, the disdukcapil innovates by giving accessibility rights to non-ministerial institutions; 4) aspects of social factors, in this aspect IKD in Banyumas Regency has a less good effect, especially on social factors because there is still a lack of understanding of the target group regarding IKD and economic factors because user requirements cannot be met by some people.

Keywords: Public Policy, Public Policy Implementation, Digital Population Identity